

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

##### **2.1.2 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dari uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, yang menyajikan posisi keuangan suatu instansi sebagai hasil dari proses akuntansi yang telah dilakukan selama satu periode pembukuan, kemudian dapat digunakan oleh *Stakeholder* maupun *shareholder* sebagai dasar pengambilan keputusan (Yuyun, 2014). Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Ruri, 2013). Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Wardani,dkk: 2018). Menurut Harnanto (2002) laporan keuangan adalah:

"Hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, yang telah dilakukan selama satu periode pembukuan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu instansi.

#### **2.1.2.1 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah bisa memenuhi kualitas yang dikehendaki dan Empat karakteristik kualitatif ini diantaranya:

1. Relevan, yaitu laporan, keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi Ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d) Lengkap. Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.
  - c) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
2. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan Kualitas Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan memenuhi karakteristik kualitatifnya berupa relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### **2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

#### **2.1.3.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### **2.1.3.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian

Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur

Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, Dimensi Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur yaitu:

#### 1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan:
  - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
  - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
  - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
  - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
  - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan
- b. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
  - b. pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
  - c. pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa

pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPI.

- c. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat untuk meminimalisir berbagai resiko pelanggaran

## 2. Penilaian Risiko

Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan: a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
2. Analisis resiko, analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

## 3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi setidaknya mencakup:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan

Melalui:

- a. evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit revidi lainnya, harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.
- b. pemeriksaan dan pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dengan memiliki beberapa unsur untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan negara.

### **2.1.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah**

#### **2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Aparatur**

Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi



mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama, 2017).

Dari beberapa teori yang dikemukakan, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang (Atiningsih, 2019). Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan. Penelitian Ningrum (2018) komponen yang harus dimiliki oleh masing-masing individu untuk pembentukan sebuah kompetensi antara lain :

1. Pengetahuan Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.
2. Ketrampilan Ketrampilan adalah “sebuah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemimpin kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.
3. Sikap adalah tingkah laku seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Penelitian Umaira (2019) mengatakan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia. Melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal dan tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka. Kemampuan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan dari kinerjanya. Beberapa pendapat di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Masing-masing individu harus memiliki komponen untuk membentuk sebuah kompetensi. Kemampuan atau keahlian dari sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pemerintahan.

## **2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

### **2.1.5.1 Pengertian Teknologi Informasi**

Teknologi informasi dapat memberikan kesempatan dan mendukung perusahaan untuk mampu lebih berkompetensi dalam era globalisasi. Teknologi muncul sebagai akibat semakin maraknya globalisasi dalam kehidupan organisasi, semakin kerasnya persaingan bisnis dan lain-lain, sehingga perusahaan mencari terobosan terbaru dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Kadir (2018: 14) Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Perangkat lunak terkait dengan instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut. Menurut Kadir (2018: 15), teknologi informasi secara garis besar memiliki peran :

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

Menurut Warsita (2018: 135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna.

### **2.1.5.2 Pengertian Pemanfaatan Teknologi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson (2017: 45) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya

berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Menurut Jogiyanto (2018: 6) pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya, berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan. Menurut Jurnal dan Supomo (2017: 54) berpendapat bahwa Pemanfaatan teknologi berhubungan dengan perilaku dalam menggunakan teknologi tersebut untuk melaksanakan tugasnya berbeda lagi dengan Jogiyanto (2018: 78), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya.

Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya, namun pengadaan Teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar. Investasi Teknologi informasi yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan maksimal. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup hanya diatur (*manage*) oleh bagian Teknologi informasi saja, tetapi harus dikelola (*govern*) secara profesional. Pengelolaan Teknologi informasi yang profesional disebut sebagai tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*).

### **2.1.5.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Komputer dan jaringan merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan komputer dan jaringan akan membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akan menyebabkan nilai informasi menjadi relevan dan laporan keuangan menjadi berkualitas (Andrianto, 2019) dan (Rahmawati, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka indikator pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(1) Penggunaan komputer

penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data keuangan.

(2) Penggunaan jaringan internet.

Jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil ringkasan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Dependent (Y)	Independent (X)	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten Bandung). (Indrawati Lili, 2022)	Y: Kualitas Laporan Keuangan.	X <sub>1</sub> :Standar Akuntansi Pemerintah  X <sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, SPI tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, serta SAP dan secara simultan memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan.
2.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah),	Y: Kualitas Laporan Keuangan.	X <sub>1</sub> :Penerapan SKAD  X <sub>2</sub> :Kompetensi Aparatur Pemerintah  X <sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SKAD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

No.	Judul dan Nama Peneliti	Dependent (Y)	Independent (X)	Hasil Penelitian
	Euis Mardiyatul Fauziyah.(2019)			
3.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi.Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gusti Ayu Made Gangga Putri Pradnyandari, Cokorda Gde Bayu Putra. (2022)	Y: Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> :Kompetensi Sumber Daya Manusia, X <sub>2</sub> :Komitmen Organisasi, X <sub>3</sub> :Sistem Pengendalian Internal	Hasil analisis menunjukkan kompetensi sumber daya manusia,Sistem Pengendalian Intern,Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan OPD kualitas di Kabupaten Tabana.
4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela (2020)	Y: Kualitas laporan keuangan	X <sub>1</sub> :Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5.	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, PemanfaatanTeknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo) Purnama Sari Br Sinulingga, Arthur Simanjuntak, Mitha	Y: Kualitas Laporan Keuangan.	X <sub>1</sub> : Penerapan SPIP X <sub>2</sub> :SAKD X <sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi X <sub>4</sub> : Kompetensi Aparatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah,pemamfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No.	Judul dan Nama Peneliti	Dependent (Y)	Independent (X)	Hasil Penelitian
	Christina Ginting,(2022)			
6.	Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang . Sri (Rahayuningsih, 2022), Maria, Darul Amri (2022)	Y: Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> :SPI, X <sub>2</sub> :SAKD, X <sub>3</sub> :Teknologi Informasi	Temuan menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi adanya penerapan SPI, SAKD, dan IT sebesar 93,9%. Ketiga faktor ini juga berdampak pada keandalan laporan keuangan.
7.	Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Rosy Armaini (2017)	Y: Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI	X <sub>1</sub> : Pengaruh Sumber Daya Manusia X <sub>2</sub> : Teknologi Informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI. Variabel SDM dan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI.
8.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI,Debi Sintia dkk (2022)	Y: Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> : Penerapan SKAD X <sub>2</sub> : Kompetensi Aparatur Pemerintah X <sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SKAD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten OKI, Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten OKI

No.	Judul dan Nama Peneliti	Dependent (Y)	Independent (X)	Hasil Penelitian
9.	Faktor-fakor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Fahmi Oemar dan Supeno (2022)	Y: Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> : Kompetensi aparatur pemerintah  X <sub>2</sub> : Teknologi Informasi  X <sub>3</sub> : Pengendalian internal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
10.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten) Kartika Dwi Indrayani & Harjanti Widiastuti. (2020)	Y : Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> :Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan  X <sub>2</sub> :Sistem Pengendalian Intern	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating Widatul Aziyah, Heri Yanto. (2022)	Y : Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> :Kompetensi Sumber Daya Manusia  X <sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern  X <sub>3</sub> : Komitmen Organisasi	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

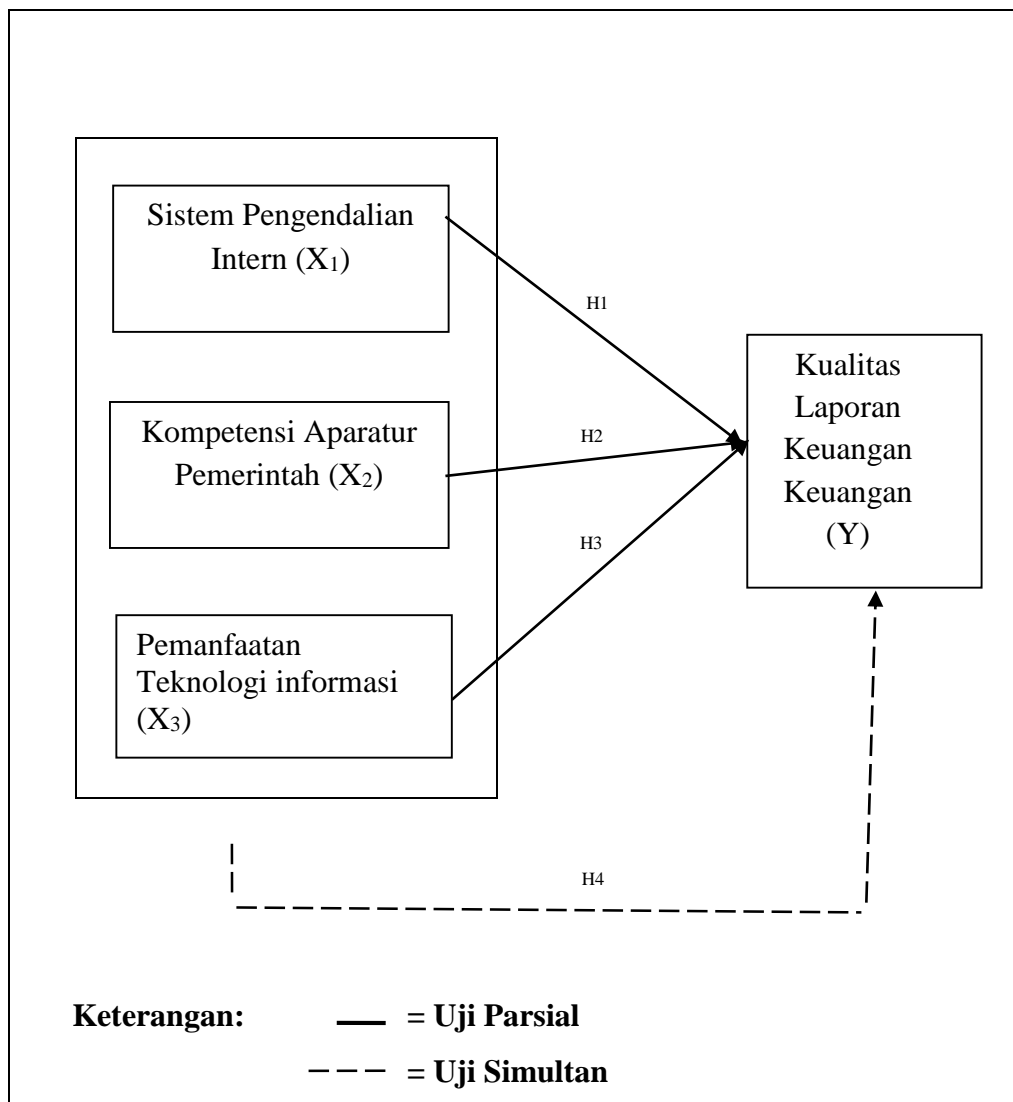
No.	Judul dan Nama Peneliti	Dependent (Y)	Independent (X)	Hasil Penelitian
12.	Pengaruh kompetensi ASN, kedisiplinan ASN, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota medan, fahimah alda, Juliana Nasution (2022)	Y: Kualitas Laporan Keuangan	X <sub>1</sub> : Pengaruh Kompetensi ASN X <sub>2</sub> : Kedisiplinan ASN X <sub>3</sub> : Teknologi Informasi	Kompetensi ASN dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kedisiplinan ASN berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Medan.

Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber, (2023)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan Pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu penelitian ini, maka sebagai kerangka





**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.2 di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan di teliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Variabel yang akan di teliti pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu, sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah atau pertanyaan penelitian. Hipotesis dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisis data (Pakpahan, dkk) (2021:34).

### **2.4.1 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pencatatan yang akurat di dalam laporan keuangan sangatlah penting, tanpa kontrol yang tepat, laporan mungkin tidak dapat diandalkan, sehingga mustahil untuk membedakan mana laporan keuangan pemerintah yang sudah baik dan mana yang perlu perbaikan. Sistem pengendalian intern dalam pelaporan keuangan pemerintah menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta mencegah kerugian pemerintah, kepentingan masyarakat dan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian intern adalah proses yang sangat integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **H1 : Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang**

### **2.4.2 Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang**

Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama, 2017). Beberapa teori yang dikemukakan, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam

pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang (Atiningsih, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memegang peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Kesuma, dkk (2018) bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di satuan kerja Kementerian Pariwisata. Penelitian ini di dukung oleh penelitian (Naholo 2021; Sikumbang, dkk., 2021; Hidayat, dkk., 2021; Sukarman dan Solovida, 2021; Rosmalita dan Nadirsyah, 2020; Laitera, dkk., 2021; Darwin dkk., 2020). Sementara hasil penelitian (Zalni 2021 dan Safitri, dkk., 2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hipotesis yang penulis diajukan adalah:

**H2: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang**

### **2.4.3 Pemamfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson (2017: 45) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam suatu laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiranti dan Wahidawati, 2021, secara empiris membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki

pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah, juga didukung hasil penelitian (Sikumbang, dkk 2021; Sukarman dan Solovida, 2021; Safitri, dkk., 2021; Laitera, dkk., 2021; Rosmalita, Nova., dan Nadirsyah, 2020; Tingginehe, dkk., 2021). Hasil penelitian (Yanti dan Saputri., 2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang**